

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA
ALOKASI UMUM, DANA BAGI HASIL, DAN PEKERJA
TERHADAP PDRB
(STUDI KASUS 35 KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI
JAWA TENGAH TAHUN 2009-2013)**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
Pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi
Universitas Diponegoro

Disusun oleh :

PUTRA ALUGORO PERKASA

NIM. 12020111130054

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2016**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Putra Alugoro Perkasa
Nomor Induk Mahasiswa : 12020111130054
Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis / Ilmu Ekonomi dan Studi
Pembangunan
Judul Skripsi : PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH,
DANA ALOKASI UMUM, DANA BAGI HASIL,
DAN PEKERJA TERHADAP PDRB (STUDI
KASUS 35 KABUPATEN /KOTA DI PROVINSI
JAWA TENGAH TAHUN 2009-2013)
Dosen Pembimbing : Fitrie Arianti. SE,. Msi.

Semarang, 22 Maret 2016

Dosen Pembimbing,

(Fitrie Arianti. SE,. Msi)

NIP. 1978111162003122003

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Putra Alugoro Perkasa
Nomor Induk Mahasiswa : 12020111130054
Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis / Ilmu Ekonomi dan Studi
Pembangunan
Judul Skripsi : PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH,
DANA ALOKASI UMUM, DANA BAGI HASIL,
DAN PEKERJA TERHADAP PDRB (STUDI
KASUS 35 KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI
JAWA TENGAH TAHUN 2009-2013)

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 22 Maret 2016

Tim Penguji

1. Fitrie Arianti. SE,. Msi. (.....)
2. Dra. Herniwati Retno Handayani, MS (.....)
3. Dr. H. Hadi Sasana, S.E, M.Si (.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Putra Alugoro Perkasa, menyatakan bahwa skripsi dengan judul: **PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DANA BAGI HASIL, DAN PEKERJA TERHADAP PDRB (STUDI KASUS 35 KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2009-2013)** adalah tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan universitas batal saya terima.

Semarang, 22 Maret 2016

Yang Membuat Pernyataan,

Putra Alugoro Perkasa

NIM. 12020111130054

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Orang yang berhasil, akan mengambil manfaat dari kesalahan-kesalahan yang ia lakukan, dan akan mencoba kembali untuk melakukan dalam suatu cara yang berbeda.”

(Dale Carnegie)

“Bila Allah memberikan cobaan, maka hadapi dengan senyum keikhlasan dan patutlah berbangga kita yang telah dipilihNya. Sebab di balik itu semua, Allah pasti mempunyai rencana dan maksud lain yang jauh lebih baik...”

Tiga kunci keberhasilan:

- 1. Man Jadda Wa Jadda (Siapa yang bersungguh-sungguh akan berhasil)*
- 2. Man Shabara Zhafira (Siapa yang bersabar akan beruntung)*
- 3. Man Saaro ‘Alaa Darbi Washola (Siapa yang berjalan di jalur-Nya akan sampai)*

ABSTRACT

Fiscal decentralization policy have been implemented in 2001 which serves to increase regional income and develop all economic potentials that exist, so it can spur an increase in output and increase economic activity, and finally will impact on improve social welfare. During 5 years of fiscal decentralization in the province of Central Java is known that the period 2009-2013, Central Java province Gross Regional Domestic Product rose steadily, but only 12 districts/cities out of 35 districts/cities have average GRDP above average GRDP of Central Java Province, while 23 districts/cities have average GRDP below average GRDP Central Java.

The goals of this study was to analyze the effect of local revenue, general allocation fund, revenue sharing fund, and labor to on Gross Domestic Regional Product in the 35 District / City of Central Java. The data used is secondary data obtained from the Central Statistics Institution of Central Java Province. Data collected were analyzed with panel data with eviews 8 program. The method used in this research is the OLS (Ordinary Least Square) with a fixed effect model or LSDV (Least Square Dummy Variable).

The Results shows that variables local revenue, revenue sharing fund positive and employment significant effect on Gross Regional Domestic Product (GRDP), while variable general allocation fund does not have a significant effect on Gross Regional Domestic Product (GRDP).

Keyword : GRDP, local revenue, general allocation fund, revenue sharing fund, employment

ABSTRAK

Kebijakan desentralisasi fiskal yang telah dilaksanakan pada tahun 2001 difungsikan untuk meningkatkan penerimaan daerah dan mengembangkan seluruh potensi-potensi ekonomi yang ada, sehingga dapat memacu peningkatan output maupun meningkatkan aktivitas perekonomian, yang pada akhirnya akan berdampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Selama 5 tahun pelaksanaan desentralisasi fiskal di Provinsi Jawa Tengah yaitu periode tahun 2009-2013 diketahui bahwa PDRB Provinsi Jawa Tengah meningkat terus, namun dari 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah hanya 12 kabupaten/kota yang rata-rata PDRB diatas rata-rata PDRB Jawa Tengah sedangkan 23 kabupaten/kota rata-rata PDRB dibawah rata-rata PDRB Jawa Tengah.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana bagi hasil, dan pekerja terhadap PDRB di 35 kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. Data yang dikumpulkan dianalisis dengan teknik data panel menggunakan program *eviews 8*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah OLS (*Ordinary Least Square*) dengan pendekatan *fixed effect* atau LSDV (*Least Square Dummy Variabel*).

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dan pekerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB, sedangkan variabel dana alokasi umum tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PDRB.

Kata Kunci : PDRB, PAD, DAU, DBH, pekerja

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, hidayah, dan karunia-Nya serta shalawat kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi inspirasi dan suri tauladan bagi penulis, atas terselesaikannya skripsi yang berjudul **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, dan Pekerja terhadap PDRB (Studi Kasus 35 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2013)**. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Program Studi Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Universitas Diponegoro Semarang. Penulis menyadari bahwa bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak sangat berarti dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih atas segala bimbingan, saran dan kerja sama dari berbagai pihak. Melalui tulisan yang sederhana ini, ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya ditujukan kepada :

1. Bapak Dr. Suharnomo, M.Si. selaku dekan fakultas ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak Hadi Sasana, Dr., S.E., M.Si selaku Dosen Wali yang telah sabar mendampingi dan membimbing penulis dan teman-teman IESP angkatan 2011.

3. Ibu Fitrié Arianti, SE., M.Si. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk membimbing, mengarahkan dan memberikan masukan yang bermanfaat dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, khususnya Jurusan IESP atas bimbingan dan pengajaran yang diberikan dalam masa studi penulis. Seluruh staf, karyawan Fakultas Ekonomi yang telah membantu memberikan informasi yang dibutuhkan dan pelayanan yang baik.
5. Bapak Kusno dan Mas Nanang selaku petugas BPS Jawa Tengah yang telah membantu dalam memperoleh data.
6. Bapak Amad Sudiharto dan Ibu Siti Suramah tersayang yang selama ini senantiasa sabar dalam membimbing, berdoa serta memberikan arahan dalam pendidikan anak-anaknya. Terima kasih karena telah menjadi motivator hidup agar selalu tetap di jalan yang benar. Doa dan dukungan kalian merupakan anugerah terindah.
7. Kakak dan Adikku tersayang Geger Agung Hariowibowo dan Arsita Wahyu Triana yang telah menjadi motivasi dan pemacu semangat penulis untuk bisa menyelesaikan skripsi ini. Semangat dan dukungan kalian sangat berharga bagi penulis.
8. Diana Puspita Sari, terima kasih atas segala perhatian, kesabaran semangat, masukan, doa dan saran sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

9. Teman–teman IESP : Akbar, Stevanus, Puguh, Faisol, Billy, Wuri, Iis, Ucha, yogo dan teman seperjuangan IESP angkatan 2011 atas kebersamaan dan kenangan yang tak terlupakan.
10. Teman KKN Desa Jekulo Kecamatan Jekulo (Jundi, Darin, Jabil, Abol, Eky, Risty, Dany, Meny, dan Fajri) terima kasih atas pengalaman yang menyenangkan.
11. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu dalam penulisan Skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Dengan segala kerendahan hati kritik dan saran yang membangun sangat diperlukan untuk perbaikan dan pencapaian hasil yang lebih baik di masa yang akan datang. Mudah-mudahan skripsi ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan referensi dalam penelitian sejenis.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 22 Maret 2016

Penulis

Putra Alugoro Perkasa
(12020111130054)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	14
1.3.1 Tujuan Penelitian	14
1.3.2 Kegunaan Penelitian.....	14
1.4 Sistematika Penulisan.....	15
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	17
2.1 Landasan Teori	17
2.1.1 Teori Sollow-Swan	17
2.1.2 Produk Domestik Regional Bruto	20
2.1.3 Desentralisasi fiskal di Indonesia	27
2.1.4 Pendapatan Asli Daerah (PAD)	30
2.1.4.1 Tujuan dan Fungsi Pendapatan Asli Daerah	32
2.1.5 Dana Alokasi Umum (DAU)	33
2.1.6 Dana Bagi Hasil (DBH)	35

2.1.7 Angkatan Kerja	36
2.2 Penelitian Terdahulu	38
2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis	44
2.4 Hipotesis	45
BAB III. METODE PENELITIAN	47
3.1 Variabel Penelitian dan Definifisi Operasional.....	47
3.1.1 Variabel Penelitian	47
3.1.2 Definisi Operasional.....	47
3.2 Jenis dan Sumber Data	48
3.3 Metode Pengumpulan Data	49
3.4 Metode Analisis Data	50
3.4.1 Analisis Regresi	50
3.4.2 Estimasi Regresi dengan Pendekatan FEM.....	52
3.4.3 Deteksi Penyimpangan Asumsi Klasik	55
3.4.3.1 Deteksi Normalitas	55
3.4.3.2 Deteksi Multikolinieritas	55
3.4.3.3 Deteksi Autokorelasi	56
3.4.3.4 Deteksi Heteroskedastisitas	57
3.4.4 Pengujian Hipotesis.....	58
3.4.4.1 Koefisien Determinasi (R^2).....	58
3.4.4.2 Uji F (Simultan).....	59
3.4.4.3 Uji t (Individu).....	60
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	62
4.1 Deskripsi Objek Penelitian.....	62
4.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	62
4.1.2 Produk Domestik Regional Bruto di Provinsi Jawa Tengah	63
4.1.3 Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Tengah.....	67
4.1.4 Dana Alokasi Umum di Provinsi Jawa Tengah	69
4.1.5 Dana Bagi Hasil di Provinsi Jawa Tengah	71

4.1.6 Pekerja di Provinsi Jawa Tengah	73
4.2 Deteksi Penyimpangan Asumsi Klasik	75
4.2.1 Deteksi Normalitas	75
4.2.2 Deteksi Multikolinieritas	76
4.2.3 Deteksi Autokorelasi	76
4.2.4 Deteksi Heteroskedastisitas	77
4.3 Pengujian Hipotesis	78
4.3.1 Koefisien Determinasi (R^2)	78
4.3.2 Uji F (Simultan)	79
4.3.3 Uji t (Individu)	79
4.4 Interpretasi Hasil dan Pembahasan	80
4.4.1 Hasil Estimasi <i>Fixed Effect Model</i> (FEM)	80
4.4.2 Hubungan Pendapatan Asli Daerah dengan PDRB	82
4.4.3 Hubungan Dana Alokasi Umum dengan PDRB	83
4.4.4 Hubungan Dana Bagi Hasil dengan PDRB	85
4.4.5 Hubungan Pekerja dengan PDRB	86
4.5 Dummy PDRB	87
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	90
5.1 Kesimpulan	90
5.2 Saran	91
DAFTAR PUSTAKA	93
LAMPIRAN	97

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2000 Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2013	2
Tabel 1.2	Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2013	6
Tabel 1.3	Dana Perimbangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2013	8
Tabel 1.4	Jumlah Angkatan Kerja Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2013	10
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	41
Tabel 4.1	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2000 di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2013	65
Tabel 4.2	Hasil Normalitas dengan Kolomogorov-Smirnov test (K-S).....	75
Tabel 4.3	Hasil <i>Variance Inflation Fakctor</i> VIF.....	76
Tabel 4.4	Hasil Uji Breusch-Godfrey	77
Tabel 4.5	Hasil Uji Glejser.....	78
Tabel 4.6	Hasil Uji t statistik.....	80
Tabel 4.7	Hasil Regresi Data Panel	81
Tabel 4.8	Dummy Produk Domestik Regional Bruto	89

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Rata-rata PDRB Atas Harga Konstan 2000 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2013.....	4
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Teoritis	45
Gambar 4.1 Peta Provinsi Jawa Tengah.....	62
Gambar 4.2 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2013	68
Gambar 4.3 Realisasi Dana Alokasi Umum Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2013	70
Gambar 4.4 Realisasi Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2013	72
Gambar 4.5 Jumlah Pekerja Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2013	74

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN A.....	98
LAMPIRAN B	103
LAMPIRAN C	105

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal telah berjalan selama lebih dari satu dekade sejak disahkan UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999 namun baru berjalan efektif pada tahun 2001. Pemerintah daerah lebih leluasa dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi berbagai kegiatan pemerintahan dan pembangunan di wilayahnya setelah adanya kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Menurut (Kuncoro, 2004) pemerintah daerah memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai kebutuhan dan aspirasi masyarakat mereka daripada pemerintah pusat sehingga lebih efektif dan efisien dalam rangka melakukan pembangunan dan pemerintahan yang mengakibatkan kesejahteraan masyarakat meningkat. Salah satu indikator utama melihat perkembangan kesejahteraan ekonomi masyarakat adalah *output* atau Produk Domestik Regional Bruto (Pusporini, 2006).

Salah satu tolak ukur untuk menilai dampak kebijakan desentralisasi fiskal terhadap perekonomian daerah adalah dengan melihat tingkat pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Produk Domestik Regional Bruto secara umum didefinisikan sebagai peningkatan dalam kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa di tempat dan waktu tertentu. Melalui PDRB atas dasar

harga konstan 2000 dapat dijadikan salah satu indikator guna melihat keberhasilan pertumbuhan perekonomian di suatu wilayah (PDRB Jawa Tengah).

Tabel 1.1
Produk Domestik Regional Bruto
Atas Dasar Harga Konstan 2000 Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2009-2013

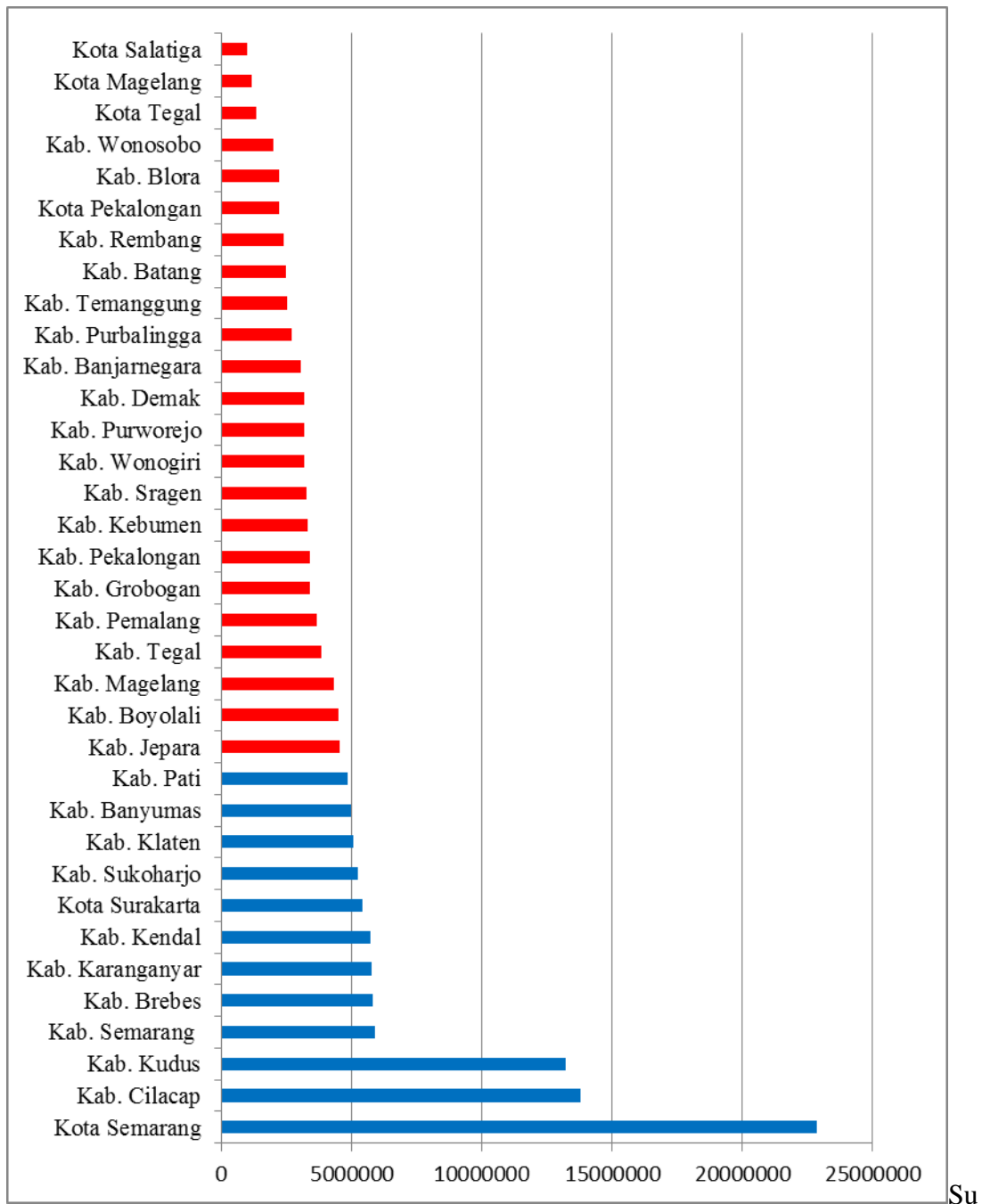
Tahun	PDRB Harga Konstan 2000 (Juta Rupiah)	Pertumbuhan (%)
2009	148.836.075,07	4,92
2010	156.282.896,53	5,00
2011	164.277.102,25	5,12
2012	173.475.448,93	5,60
2013	183.547.788,91	5,81

Sumber: Jawa Tengah dalam angka, BPS, 2014

Tabel 1.1 menunjukkan jumlah PDRB daerah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2009-2013 mengalami kenaikan. Pada tahun 2009 sampai 2013 Provinsi Jawa Tengah memiliki rata-rata pertumbuhan PDRB sebesar 5,29 persen. Kenaikan pertumbuhan PDRB tertinggi terjadi pada tahun 2012 sebesar 0,48 persen, sedangkan kenaikan pertumbuhan PDRB terendah terjadi pada tahun 2010 sebesar 0,08 persen. Provinsi Jawa Tengah memiliki keunggulan letak geografis karena terletak diantara Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Timur menyebabkan mobilitas barang dan penduduk yang melewati Provinsi Jawa Tengah cukup tinggi. Keuntungan tersebut dapat membantu pertumbuhan PDRB bila dimanfaatkan dengan baik.

Berbeda dengan Todaro (2003) yang menyatakan bahwa, perekonomian yang tinggi disuatu wilayah tidak mencerminkan kesejahteraan yang merata bagi seluruh masyarakat wilayah tersebut. Selain itu, tingkat PDRB yang tinggi tidak dengan sendirinya diikuti oleh pertumbuhan atau perbaikan distribusi keuntungan bagi segenap penduduk. Peningkatan PDRB di Provinsi Jawa Tengah diharapkan terjadi secara merata di kabupaten/kota. Pernyataan tersebut dapat dibuktikan dengan melihat jumlah rata-rata PDRB menurut kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut.

Gambar 1.1
Rata-rata PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000
Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2009-2013 (Juta Rupiah)



Sumber : Jawa Tengah dalam angka, BPS berbagai tahun terbitan diolah

Gambar 1.1 menunjukkan dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah, hanya 12 kabupaten/kota yang memiliki PDRB di atas rata-rata PDRB Jawa Tengah. Sedangkan 23 kabupaten/kota di Jawa Tengah masih berada di bawah rata-rata PDRB Jawa Tengah. Kabupaten/kota yang memiliki PDRB di atas rata-rata PDRB Jawa Tengah adalah Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Pati, Kabupaten Kudus, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Brebes, Kota Surakarta, Kota Semarang. Sedangkan kabupaten/kota di Jawa Tengah yang masih berada di bawah rata-rata PDRB Jawa Tengah adalah Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Kebumen, kabupaten Magelang, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sragen, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora, Kabupaten Rembang, Kabupaten Jepara, Kabupaten Demak, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, Kota Magelang, Kota Salatiga, Kota Pekalongan, Kota Tegal.

Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan desentralisasi fiskal yang dilakukan di tiap daerah di Provinsi Jawa Tengah juga belum berjalan dengan baik. Desentralisasi fiskal yang diterapkan tidak serta merta menjadikan seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah mengalami peningkatan PDRB secara bersamaan. PDRB berdasarkan harga konstan tahun 2000 secara umum mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, namun hanya sebagian wilayah saja yang mengalami peningkatan secara signifikan.

Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam mengoptimalkan potensi pendanaan daerahnya sendiri sehingga pendapatan asli daerah (PAD) sebagai komponen penerimaan daerah juga meningkat. Peningkatan PAD yang dianggap sebagai modal, secara akumulasi akan lebih banyak menimbulkan eksternalitas yang bersifat positif sehingga menunjang kegiatan perekonomian yang berakibat pada meningkatnya *output* di daerah (Pujiati,2008). Sebagaimana dalam UU No. 32 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang berasal dari daerah itu sendiri berdasarkan kemampuan yang dimiliki. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengolahan daerah yang dipisahkan dan lain – lain pendapatan yang sah.

Tabel 1.2
Pendapatan Asli Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2013

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Ribu Rupiah)	Pertumbuhan (%)
2009	2.656.774.760	-
2010	3.044.658.121	14,60
2011	3.728.405.865	22,46
2012	4.887.191.503	31,08
2013	6.092.969.558	24,67

Sumber : BPS, Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Tahun 2009-2013

Tabel 1.2 menunjukkan pendapatan asli daerah di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2009-2013 terus mengalami pertumbuhan yang positif. Pada tahun 2010 mengalami pertumbuhan sebesar 14,60 persen dan meningkat menjadi 22,46 persen. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2012 sebesar 31,08 persen kemudian turun di tahun 2013 menjadi 24,67 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah Provinsi Jawa Tengah dapat menggali dan memanfaatkan sumber daya asli daerah dengan maksimal. Peningkatan PAD sangat menentukan dalam penyelenggaraan otonomi daerah, karena semakin tinggi PAD disuatu daerah maka daerah tersebut akan menjadi mandiri dan mengurangi ketergantungan kepada pusat sehingga daerah tersebut mempunyai kemampuan untuk melaksanakan otonomi daerah.

Kenyataannya hubungan yang terjadi antara pemerintah pusat dan daerah ditandai dengan tingginya kontrol pusat terhadap proses pembangunan daerah. Proporsi PAD terhadap total penerimaan daerah termasuk rendah jika dibandingkan dengan besarnya subsidi (*grant*) yang diberikan pusat (Kuncoro,2004). Transfer dari pemerintah pusat melalui dana perimbangan mengalami peningkatan untuk mendanai pelayanan publik. Artinya daerah yang menerima dana perimbangan lebih besar, menunjukkan bahwa PAD yang dapat dihasilkan pada daerah tersebut terbilang kecil dan memiliki potensi sumber daya yang masih kurang, sehingga perlu dana perimbangan dari pemerintah pusat agar dapat menutupi kekurangan dari potensi sumber daya yang dimiliki pada daerah tersebut (Azzumar, 2011).

Menurut UU Nomor 33 tahun 2004, Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan

kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan terdiri dari Bagi hasil Pajak dan Bukan Pajak (SDA), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Perimbangan sebagai faktor produksi modal digunakan untuk meningkatkan *output* daerah.

Tabel 1.3
Dana Perimbangan
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2013

Tahun	Dana Perimbangan (Ribu Rupiah)	Pertumbuhan (%)
2009	22081569896	-
2010	22494037739	1,86
2011	24361301790	8,30
2012	29327913335	20,38
2013	31678228507	8,01

Sumber : BPS, Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Tahun 2009-2013

Tabel 1.3 menunjukkan dana perimbangan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2009-2013 terus mengalami pertumbuhan yang positif. Pada tahun 2010 mengalami pertumbuhan sebesar 1,86 persen dan meningkat menjadi 8,30 persen. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2012 sebesar 20,38 persen kemudian turun di tahun 2013 menjadi 8,01 persen. Dengan jumlah 29 kabupaten dan 6 kota Provinsi Jawa Tengah menerima transfer dana perimbangan dari pemerintah pusat cukup besar.

Menurut hasil penelitian Bintoro Rianto (2002) hasil Simulasi untuk melihat pertumbuhan ekonomi daerah menggunakan tingkat PDRB. Hasil simulasi model menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal secara tidak langsung mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah melalui *output*. Hasil simulasi menunjukkan bahwa secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dari alokasi transfer pemerintah dalam bentuk Dana Perimbangan akan memberikan peningkatan *output* untuk tiap daerah di Indonesia. Diperkuat oleh penelitian dari Pusporini (2006) yang menyatakan bahwa Dana Perimbangan dan pendapatan asli daerah secara signifikan mempunyai hubungan positif terhadap peningkatan *output* sehingga dalam jangka panjang PDRB dapat meningkat.

Salah satu faktor yang mempengaruhi *output* daerah adalah sumber daya manusia (penduduk) yang ada di suatu wilayah. Penduduk yang bertambah akan memperbesar jumlah pekerja, penambahan tersebut akan mendorong suatu daerah untuk menambah produksinya. Pertumbuhan penduduk (angkatan kerja) yang disertai dengan tersedianya lapangan pekerjaan akan meningkatkan *output* daerah. Akan tetapi akan berakibat buruk ketika pertambahan penduduk tersebut tidak diimbangi oleh kesempatan kerja yang ada, sehingga peningkatan ekonomi yang diharapkan tidak sejalan dengan peningkatan kesejahteraan. Pertumbuhan jumlah angkatan kerja bekerja dan pengangguran) Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2009-2013 dapat dilihat pada Gambar 1.4 berikut :

Tabel 1.4
Jumlah Angkatan Kerja
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2013 (Jiwa)

Tahun	Bekerja	Pengangguran Terbuka	Jumlah
2009	15.835.382	1.252.267	17.087.649
2010	15.809.447	1.046.883	16.856.330
2011	15.916.135	1.002.662	16.918.797
2012	16.132.890	962.141	17.095.031
2013	15.946.048	1.022.728	16.986.776

Sumber : Jawa Tengah dalam angka, BPS, 2014

Tabel 1.4 menunjukkan bahwa jumlah orang yang bekerja dan pengangguran dari tahun 2009-2013 berfluktuatif. Pada tahun 2011 kenaikan jumlah orang yang bekerja sebanyak 0,67 persen dan mengalami kenaikan pada tahun 2012 sebesar 1,36 persen namun turun kembali pada tahun 2013 sebesar -1,16 persen. Sedangkan pengangguran terbuka mengalami penurunan tertinggi terjadi pada tahun 2010 sebesar -16,40 persen hingga tahun 2012 sebesar -4,04 persen, namun pada tahun 2013 mengalami kenaikan yang cukup tinggi sebesar 6,30 persen.

Sejalan dengan Parhah (2002) menyatakan bahwa semakin besar jumlah pekerja akan meningkatkan jumlah *output* yang dihasilkan di dalam perekonomian. pekerja sebagai salah satu faktor produksi yang dipakai dalam proses produksi peranannya dipengaruhi oleh ketrampilan, tingkat pendidikan, dan daya kreasi yang dimiliki oleh pekerja tersebut. Semakin tinggi pekerja tersebut memiliki kemampuan

itu, maka akan cenderung meningkatkan produktivitasnya. Sehingga *output* yang dihasilkan pun akan meningkat menyebabkan PDRB ikut meningkat.

Beberapa penelitian menunjukkan hasil yang berbeda-beda mengenai variabel yang mempengaruhi PDRB, seperti penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Dorani (2011) dengan judul “Analisis Pengaruh Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal terhadap PDRB di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2008”. menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB. Sedangkan Nurul Widyasari (2013) menemukan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap PDRB.

Penelitian yang dilakukan oleh Izzatul Ulfi (2011) dengan judul “Analisis Pengaruh Dana Perimbangan dan Pekerja terhadap PDRB di Jawa Tengah 2007-2009” bahwa dana alokasi umum (DAU) berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB. Namun hasil yang berbeda ditunjukkan dalam penelitian Amin Pujiati (2008) menemukan bahwa dana alokasi umum (DAU) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap PDRB.

Ahmad Dorani (2011) dengan penelitiannya yang berjudul “Analisis Pengaruh Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal terhadap PDRB di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2008”. menunjukkan bahwa dana bagi hasil (DBH) berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB. Sedangkan hasil penelitian yang berbeda dilakukan oleh Asmaul Husna, SE., Ak., MM dan Myrna Sofia, SE., M.Si (2013) bahwa dana bagi hasil (DBH) berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap PDRB.

Izzatul Ulfi (2011) dengan judul “Analisis Pengaruh Dana Perimbangan dan Pekerja terhadap PDRB di Jawa Tengah 2007-2009” bahwa pekerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB. Tetapi penelitian yang dilakukan oleh Fitrah Afrizal (2013) menemukan bahwa pekerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap PDRB.

Berdasarkan hasil studi yang berbeda-beda mengenai kebijakan desentralisasi fiskal ini menunjukkan masih adanya *research gap*. Hal ini menarik peneliti untuk mencoba menganalisis kembali penelitian-penelitian sebelumnya dengan menggunakan indikator-indikator yang sesuai, sehingga dapat mempertajam penjelasan mengenai apakah Desentralisasi Fiskal yang terdiri dari PAD, DAU, DBH serta pekerja yang diterapkan akan benar-benar berpengaruh positif terhadap PDRB kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

1.2 Rumusan Masalah

Kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal membuat Provinsi Jawa Tengah mampu menggali dan mengelola sumber-sumber penerimaan baik yang berasal dari pendapatan daerah yaitu melalui pendapatan asli daerah maupun transfer dari pemerintah pusat berupa dana perimbangan. Provinsi Jawa Tengah dengan kapasitas fiskal yang tinggi serta didukung oleh potensi sumber daya alam yang melimpah, sumber daya manusia, luas wilayah, dan banyaknya industri menyebabkan PAD dan dana perimbangan yang di terima Provinsi Jawa Tengah cukup tinggi.

Dengan adanya PAD dan dana perimbangan yang tinggi dapat menambah akumulasi modal yang merupakan salah satu sumber untuk meningkatkan PDRB.

Kenyataannya distribusi PDRB di Provinsi Jawa Tengah belum merata. Sebagian besar kabupaten/kota di Jawa Tengah memiliki PDRB dibawah rata-rata, dimana terdapat 23 Kabupaten/Kota dengan rata-rata PDRB dibawah rata-rata PDRB Jawa Tengah dan hanya terdapat 12 daerah yang rata-rata PDRB diatas rata-rata PDRB Jawa Tengah.

Selain itu adanya ketidakkonsistenan penelitian terdahulu (*research gap*) tentang hubungan PAD, DAU, DBH, dan Pekerja terhadap PDRB daerah, yaitu antara lain perbedaan pandangan antara penelitian Ahmad Dorani (2011); Izzatul Ulfi (2011); Nurul Widyasari (2013); Amin Pujiati (2008); Asmaul Husna, SE., Ak., MM dan Myrna Sofia, SE., M.Si (2013); dan Fitrah Afrizal (2013). Perbedaan yang mendasar tersebut menarik peneliti untuk mengkaji lebih dalam mengenai penelitian ini yang mengacu pada penelitian-penelitian sebelumnya dengan menggunakan komponen-komponen desentralisasi fiskal yang juga sebagai indikator bagi PDRB.

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah di atas maka pertanyaan yang menarik untuk diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh PAD (Pendapatan Asli Daerah) terhadap PDRB kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah ?
2. Bagaimana pengaruh DAU (Dana Alokasi Umum) terhadap PDRB kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah ?

3. Bagaimana pengaruh DBH (Dana Bagi Hasil) terhadap PDRB kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah ?
4. Bagaimana pengaruh pekerja terhadap PDRB kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah ?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh PAD (Pendapatan Asli Daerah) terhadap PDRB kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.
2. Untuk mengetahui pengaruh DAU (Dana Alokasi Umum) terhadap PDRB kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.
3. Untuk mengetahui pengaruh DBH (Dana Bagi Hasil) terhadap PDRB kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.
4. Untuk mengetahui pengaruh pekerja terhadap PDRB kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Instansi Pemerintah

Sebagai bahan masukan agar pemerintah pusat khususnya pemerintah daerah lebih memperhatikan tentang kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal.

2. Bagi dunia akademis

Hasil penelitian dapat di pakai sebagai bahan referensi perpustakaan, untuk referensi perbandingan terhadap objek penelitian yang samakhususnya tentang PAD, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, dan Pekerja Terhadap PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

3. Bagi penulis

Bagaimana penulis dapat mempratekan pengetahuan yang diperoleh dalam bentuk tulisan sekaligus mendapatkan pengetahuan mengenai hal yang di teliti.

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab pertama akan dijelaskan mengenai latar belakang masalah pemilihan judul penelitian yaitu pengaruh pendapatan asli daerah, DAU, DBH, dan pekerja terhadap PDRB di era desentralisasi fiskal, perumusan masalah, serta tujuan dan kegunaan dari penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab kedua menjelaskan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian yaitu pendapatan asli daerah, DAU, DBH, angkatan kerja, PDRB, Teori Sollow-Swan dan

fungsi produksi. Bab ini juga mengungkapkan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ketiga menjelaskan definisi operasional variabel-variabel dalam penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab empat akan dijelaskan mengenai hasil yang didapat setelah mengadakan penelitian yang mencakup gambaran umum penelitian, hasil analisis data panel yang mencakup 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, hasil perhitungan data dengan alat analisis regresi OLS (*Ordinary Least Square*), dan inteprestasi hasil dari penelitian.

BAB V : PENUTUP

Bab kelima merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan dan saran yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan.

